

# **PROBLEMATIKA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Imam Lukito**

## **Abstrak**

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimanakah penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila terjadi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah?, dan bagaimanakah upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menitikberatkan pada data sekunder, dengan memaparkan tentang peraturan yang berlaku dalam pemberantasan korupsi dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa aparat penegak hukum memanfaatkan luasnya unsur-unsur tindak pidana korupsi untuk menjerat pelaku penyimpangan pengadaan barang dan jasa, terhadap Pejabat yang melakukan korupsi dalam pengadaan, aparat penegak hukum menggunakan pasal 2 dan pasal 3 sebagai unsur dalam delik korupsi yaitu melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan wewenang dan dapat merugikan keuangan Negara. Upaya untuk mencegah tindak pidana korupsi dalam pengadaan pemerintah antara lain: menerapkan dengan tegas prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang dan jasa yang akuntabel dan transparan, melakukan pengendalian dan pengawasan intern pemerintah oleh lembaga pengawas pada intitusi yang melaksanakan pengadaan, dan mengimplementasikan pengadaan secara elektronik. Untuk memberikan efek jera terhadap koruptor selain hukuman penjara perlu ditambahkan hukuman lain berupa pemiskinan dan hukuman kerja sosial.

**Kata Kunci:** Problematika, Korupsi, Pengadaan barang dan jasa

# **THE PROBLEMATICS OF GOVERNMENT'S PROCUREMENT IN LAW PERSPECTIVE OF CORRUPTION ERADICATION**

**Imam Lukito**

## **Abstract**

This study was conducted to answer the problem of how the implementation of the Law on Corruption Eradication in the event of irregularities in government's procurement?, how efforts to prevent corruption in government's procurement?. The method used is a normative juridical with emphasis on secondary data, to explain about the rules that apply in combating corruption and implementation of government's procurement. Analysis of data used is qualitative methods. The research result, indicated that law enforcement officials utilize breadth the elements of corruption in corruption eradication law to catch the perpetrators of irregularities procurement, against state officials who commit corruption in procurement, they using article 2 and article 3 as elements of corruption delict that is against the law, to enrich themselves or another person or corporation, abuse of power and can be harm to the state finances. Efforts to prevent corruption in the government's procurement, among others: to apply strictly the principle of good governance of the accountable and transparent procurement, internal control and oversight by the regulator on institutions that carry out procurement, and implementing electronic procurement. To provide deterrent effect, should be added another penalty such as impoverishment and social work for the corruptor.

**Keywords:** Problematics, Corruption, Procurement